

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program.

Masalah kemiskinan pada dasarnya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, dengan memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kemiskinan yang ada saat ini menyebabkan banyak anak tidak mampu mengenyam pendidikan, tingginya kasus malnutrisi, berdampak buruk bagi ibu hamil. berkurangnya produktivitas dan daya tahan tubuh, gizi buruk balita, tingginya angka kematian bayi, tingginya angka kematian balita. Bahkan dalam kenyataan rendahnya tingkat pendidikan sebuah rumah tangga sangat miskin menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan, masyarakat juga merasa kesulitan dikarenakan biaya kesehatan saat ini sangatlah tinggi.

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2013 sebanyak 28,60 juta orang. Ada 14 (empat belas) kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga/ rumah tangga yang dikategorikan miskin menurut badan pusat statistik ialah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Merujuk tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pasal 1 yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010).

Maka dengan adanya peraturan presiden tersebut maka pemerintah membuat suatu kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan akan memberikan dampak seperti yang diharapkan. Diharapkan dalam jangka pendek, program bantuan ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sedangkan dalam jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Data yang tercatat di kantor Desa Sidomulyo di menyatakan bahwa jumlah masyarakat miskin mencapai 1335 berdasarkan data tersebut maka pemerintah Desa Sidomulyo melaksanakan program atau suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang dikenal dengan nama PKH. Dalam pelaksanaan PKH pada Desa Sidomulyo peneliti menemukan permasalahan yaitu Pada tahun 2007 Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan di kabupaten Deli Serdang.

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan dilaksanakan mulai pada tahun 2007. Desa Sidomulyo merupakan desa dari Kecamatan Biru-Biru Kab. Deli Serdang yang memiliki 933 rumah tangga dari 1-3 dusun dan 3.765 penduduk. Data lengkapnya dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Di Desa Sidomulyo Pada 3 Dusun

Dusun	Jumlah / KK	Jumlah Penduduk
I	520	2.220
II	330	1.328
III	83	217
Jumlah	933	3.765

Sumber: Kantor Desa Sidomulyo(2023)

Dari 3 dusun di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang penerima anggota PKH per 3 tahun kebelakang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Jumlah Penerima PKH Di Desa Sidomulyo Pada 3 Tahun Terbaru

Dusun	Tahun		
	2020	2021	2022
I	42	28	15
I	45	32	21
III	40	37	30
Jumlah	127	97	66

Sumber: Kantor Desa Sidomulyo (2023)

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi program keluarga harapan di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang dimana program keluarga harapan tersebut diperuntukkan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Diharapkan dengan adanya implementasi program keluarga harapan tersebut masyarakat yang kurang mampu bisa berubah keadaan perekonomiannya menjadi lebih baik dan sejahtera. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah pemahaman dan pengetahuan peneliti serta penerapan pemahaman yang saya miliki lalu dapat memberikan manfaat bagi diri saya maupun orang lain dalam penelitian ini, dan menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa secara umum dan jurusan Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan warga masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia melalui program kerja dan implementasi bantuan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik telah berkembang pesat dan menjadi topik penelitian yang populer bagi mahasiswa. Maka dari itu saya disini turut mengambil dengan topik yang banyak diaplikasikan oleh mahasiswa yang dituangkan dalam penelitiannya. Implementasi kebijakan publik seringkali dihadapi dengan berbagai masalah di Indonesia. Maka dari itu, perlu nya dari *stakeholder*/pemerintah melakukan pengawasan dan penerapan peraturan kebijakan publik, berikut penjabaran secara harfiah mengenai implementasi kebijakan publik pada sub-bab selanjutnya. Dari seluruh proses kebijakan publik, tahapan yang kemudian secara nyata akan memberi makna positif dan sumbangan ril pada output dan outcomes dari sebuah kebijakan publik adalah implementasi kebijakan itu sendiri (Sutmasa 2021:26).

2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapaitujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

informasi kebijakan derivet atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu melalui program, keproyek melalui kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen khususnya manajemen sector publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat .

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaransasarankebijakan itu sendiri. Proses implementasi kebijakan tersebut dimulai dengan menterjemahkan suatu kebijakan ke dalam suatu program dan kemudian dilakukan dengan pembentukan organisasi pelaksana serta dilanjutkan pada penerapan prosedur dan mekanisme kegiatan yang ditetapkan dalam program yang akan diimplementasikan (Kertati, Indra et al 2023:39).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan

berperan menentukan hasil yang baik. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang).

Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor untuk keberhasilan atau pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari rakyat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas lebih dulu
- c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu.
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berartidiferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertical
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang (*decentralization*) yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberian tugas dan kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain ada faktor pendukung suatu implementasi kebijakan, ada pula faktor penghambatnya. Faktor-faktor penghambat atau penyebab gagalnya implementasi kebijakan

sebagai berikut:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor intern dan/ atau faktor ekstern
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pasti ada atau muncul ketika suatu kebijakan diterapkan di lapangan. Dimana bila suatu kebijakan kurang atau tidak memenuhi target saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor yang menghambat kebijakan itu. Begitu pula bila suatu kebijakan memenuhi target bahkan melebihi target yang ditentukan saat di implementasikan berarti ada suatu faktor yang mendorong kebijakan tersebut.

2.1.3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Memahami lebih jauh proses implementasi kebijakan publik berarti pula mencermati model-model implementasi kebijakan publik. Sesuai judul penelitian, maka untuk keperluan penelitian, peneliti hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

A. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn pendekatan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, di antaranya adalah aspek standar, sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan;

aspek sumber daya; aspek komunikasi antar organisasi terkait; aspek karakteristik organisasi pelaksana; dan aspek sikap para pelaksana (Ropingah, et al 2022:10).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dischut juga dengan 4 Model *of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Hor menamai model implementasi yang mereka rumuskan dengan model proses. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara program/kebijakan dan pencapaian. Enam Variabel tersebut adalah :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program.

Identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Sumber layak mendapatkan perhatian karena sangat menunjang keberhasilan sebuah program. Sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Dalam banyak program implementasi, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah

organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan dan sarannya

4. Karakteristik agen pelaksana.

Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Disposisi atau kecenderungan *implementators*. Dibedakan dalam tiga hal (a) *respons implementator* terhadap kebijakan; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; (c) *intensitas dispose implementator* yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang ada baik sosialpolitik dan ekonomi yang dimiliki masyarakat.

B. Model Implementasi Merille S. Grindle

Implementasi yang dikembangkan oleh Merille S. Grindle memberikan suatu kerangka pikir dalam implementasi kebijakan, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu untuk konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

2. Larakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan. Kesukaran-kesukaran yang sering dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah diperinci kedalam empat persoalan besar, yakni kesukaran-kesukaran teknis, keragaman perilaku yang diatur, presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran dan tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

- a. Kesukaran-kesukaran teknis.

Tercapainya atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

- b. Keragaman perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan elas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat dilapangan.

- c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok

Semakin kecil dan semakin jelas (dapat dibedakan dari kelompok lain), kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal tujuan undang-undang adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar jumlah-jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sukar memperoleh implementasi yang berhasil

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. Kemampuan oleh para pembuat kebijakan dalam memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi orientasi kebijakan dari para pejabat pemerintah, dan dengan cara memberikan kesempatan berpartisipasi bagi pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat dalam proses implementasi tersebut.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Ketiga kategori variabel tersebut diatas, disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*), sedangkan yang dibedakan dalam tahap-tahap implementasi yang harus dilalui disebut variabel tergantung

(*dependent variable*). Dalam hubungan ini, tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain. Proses ini adalah sebagai mana tahapan berikut:

- a. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana
- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
- e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang,

Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu dibawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun disini terdapat dua proses yang terpisah. Untuk sekedar mengetahui dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang terpenting adalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Meskipun demikian, bila evaluasi terhadap undang-undang juga diperhatikan juga ada baiknya.

C. Model Brian W. Hogwood (1978) dan Lewis A. Gunn (1986)

Model ini biasa disebut dengan model *Top down approach*. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan secara sempurna memerlukan beberapa syarat, yaitu

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Jadi, model implementasi kebijakan menurut Hogwood and Gunn adalah menggunakan *top down approach* atau pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan *top down* atau dari atas ke bawah adalah pendekatan yang diawali dari perintah atasan kemudian dilanjutkan kepada bawahan. Namun dalam pengimplementasian kebijakan secara sempurna menurut hogwood and gunn harus memenuhi beberapa syarat seperti yang telah dijelaskan di atas. Beberapa syarat diatas adalah sebuah sistem yang saling terikat, sehingga masing-masing syarat tersebut harus saling mendukung demi tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang sempurna seperti yang di harapkan.

D. Model Implementasi Edward III

Di model ini terdapat 4 faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor itu adalah *Communication, resources, dispositions* dan *beureueratic structure*.

1. Faktor komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

2. Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh. sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan.

4. Struktur Birokrasi (*beureucratic structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang bersangkutan dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapat mereka tentang model-model implementasi kebijakan, seperti Edward III yang mengemukakan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah keempat faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dimana masing-masing faktor memiliki peranan yang sama-sama penting. sehingga keempat faktor tersebut harus terpenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Kesemua model yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, oleh sebab itu suatu evaluasi implementasi kebijakan juga kepatuhan terhadap aturan-aturan perlu diperhatikan demi keberhasilan implementasi kebijakan.

2.2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial kontingen yang diawasi oleh pemerintah Indonesia. Program ini diharapkan dapat menggarap bantuan keuangan pemerintah bagi keluarga miskin atau tertindas dengan memberikan bantuan keuangan berupa uang dan makanan secara konsisten (Brian 2023:1). Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (Najidah, Nurul., Hesti Lestari 2019:1). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

2.2.2. Dasar Landasan Hukum dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Landasan hukum yang mendasari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain (Suwinta, Antriya., Indah Prabawati 2015:3) :

1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin,
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan,
5. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Keputusan Direktur Jenderal Direktur Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor BJS/85/05/04/V/2009 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan tahun 2009.

Dasar pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain :

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007,
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.

2.2.3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi

Faktor-faktor untuk keberhasilan atau pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari rakyat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas lebih dulu
- c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu.
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertical
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang (*decentralization*) yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban (*deconcentration*) yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Sepuluh kondisi agar implementasi kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan baik yaitu:

- a. Situasi di luar agen implementasi tidak menimbulkan pembatasan yang melumpuhkan
- b. Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia
- c. Tidak ada batasan dalam sumber daya secara keseluruhan dan juga setiap tahap dalam proses implementasi membutuhkan kombinasi sumber-sumber daya yang tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid
- e. Hubungan antara sebab akibat adalah bersifat langsung dan hanya ada sedikit, jika ada, hubungan yang mengganggu
- f. Ada satu agen implementasi yang tidak selalu tergantung kepada agen lain agar bisa sukses. Jika agen lain harus dilibatkan, hubungan ketergantungan itu minimal dalam hal jumlah dan arti pentingnya
- g. Ada pemahaman penuh dan kesepakatan mengenai tujuan yang hendak diraih dan kondisi ini harus ada diseluruh proses implementasi

- h. Dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan secara rinci dan komplit, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap partisipan
- i. Ada komunikasi dan koordinasi sempurna diantara beragam elemen atau agen yang terlibat dalam program
- j. Pihak yang berkuasa dapat meminta/menuntut ketaatan yang sempurna

Selain ada faktor pendukung suatu implementasi kebijakan, ada pula faktor penghambatnya.

Faktor-faktor penghambat atau penyebab gagalnya implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e. Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ekstern
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
- h. Adanya kekuatan akan tersedianya sumber sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pasti ada atau muncul ketika suatu kebijakan diterapkan di lapangan. Dimana bila suatu kebijakan kurang atau tidak memenuhi target saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor yang menghambat suatu kebijakan memenuhi target bahkan melebihi target yang ditentukan saat diimplementasikan berarti ada suatu faktor yang mendorong kebijakan tersebut.

Kemudian beberapa pakar berikut ini juga akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik dirasa penting

untuk memberikan perhatian lebih kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan yang bertindak sebagai pelaksana. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik. Faktor-faktor keberhasilan implementasi antara lain:

- (a) Para pelaksana harus memusatkan perhatian pada problematika sebagaimana mencapai konstitensi tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Misalnya mereka harus berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan tersebut
- (b) Para pelaksanan tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan
- (c) Daya tanggap. Lembaga-lembaga publik harus tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan. memungkinkan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik selama proses implementasi suatu kebijakan publik.
- (d) Tetap mengusahakan control yang memadai atas distribusi sumber kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik
- (e) Kecakapan dalam sen politik. Keluasan wawasan dan kejelian yang muncul dari para actor yang terbagai kemungkinan tanggapan yang muncul dimana para pelaksana berusaha mewujudkan kebijakan publik.

Penilaian terhadap kebijakan negara seringkali menunjukkan bahwa kebijakan Negara tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain:

- (a) Keterbatasan ketersediaan sumber-sumber, meliputi biaya, tenaga, waktu, material dan sebagainya
- (b) Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara

- (c) Problema-problema publik yang timbul dari berbagai faktor
- (d) Masyarakat yang memberikan respon atau melaksanakan kebijakan dengan cara-caranya sendiri. Implementasi kebijakan dilaksanakan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan
- (e) Beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain
- (f) Usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah itu sendiri
- (g) Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- (h) Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan
- (i) Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

Disamping itu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kiranya perlu diketahui pula tentang sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan Negara dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui
 - a. Respek anggota masyarakat terhadap keputusan-keputusan badan pemerintah.
 - b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan otoritas dan adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang serta melalui prosedur yang benar
 - c. Adanya kepentingan pribadi

- d. Adanya hukuman-hukuman tertentu apabila tidak melaksanakan kebijakan
 - e. Masalah waktu
2. Sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan negara:
- a. Kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat
 - b. Adanya konsep ketidak-patuhan selektif terhadap hukum
 - c. Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok
 - d. Keinginan untuk mencari untung dengan cepat
 - e. Adanya ketidak-pastian hukum

Semua kebijakan negara apapun bentuknya atau jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, peranan badan/lembaga pemerintah sangat besar sekali untuk mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat atau kebijakan pemerintah.

2.2.4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH terdiri dari sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

2.2.5. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar;
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan
3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil.

2.2.6. Syarat dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan:

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

2.2.7. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada proses program keluarga harapan (PKH) ada skema yang dilakukan dalam tahap pembayaran terminnya. Yaitu, pembayaran bantuan dilakukan empat kali atau empat tahap dalam satu tahun.

1. Bantuan tetap yang diberikan kepada peserta PKH adalah Rp. 200.000,-.
2. Jika peserta memiliki anak usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp. 800.000,-.
3. Bertambah Rp. 400.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI.
4. Bertambah lagi Rp. 800.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan setara SMP/MTs.

Penerima bantuan atau peserta PKH tentu akan menerima jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga yang dimilikinya. Namun jika peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan dalam tiga bulan maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang Rp.50.000 untuk bulan pertama, berkurang Rp. 100.000 pada bulan kedua dan pada bulan ketiga berkurang Rp. 150.000 apabila masih tidak memenuhi komitmen. Jika dalam tiga bulan berturut-turut masih tidak memenuhi komitmen maka akan dikeluarkan dari kepesertaan.

Selain Dalam bentuk uang kepada Masyarakat, Pemerintah memfasilitasi kesehatan yang telah disediakan yang tertuang pada pedoman PKH yaitu:

1. Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, maupun posyandu.
2. Dokter, Bidan, Petugas gizi, jurim, kader, atau perawat.
3. Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit
4. Obat-obatan umum seperti Tablet Fe, Vitamin A, obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan Kesehatan ibu dan bayi pasca lahir.
5. Vaksin BCG, DPT, polio, campak, Hepatitis B, TT ibu hamil.
6. Buku Register (Kartu Menuju Sehat).

PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan UPPKH Kecamatan (pendamping PKH). Masing-masing pelaksana memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan PKH. Adapun yang berperan penting yaitu:

UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan dan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan

Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan.

2.2.8. Penelitian Terdahulu

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama agar dapat menjadi acuan dalam penelitian ini, berikut uraian singkat dari penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	TAHUN PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	JENIS PENELITIAN DAN KESIMPULAN
Lubis, Fitri suciati	2016	Implementasi program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	Jenis penelitian: metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

		<p>Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kecamatan Medan Tuntungan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari pemilihan dan penetapan peserta PKH, adanya pertemuan awal, tahap pembayaran, adanya pembentukan kelompok Ibu penerima PKH, Verifikasi Komitmen, penangguhan dan penutupan, serta proses pengaduan.</p>	<p>Kesimpulan: Sebelum adanya Program Keluarga Harapan di kecamatan Medan Tuntungan dapat dikatakan belum sejahtera dan masih dibawah kesejahteraan dikarenakan masih sangat rentan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan penghasilan masyarakat miskin pas-pasan jadi mereka lebih mengutamakan kebutuhan makanan sehari-hari dan kalau dalam bidang kesehatan mereka lebih memilih untuk membeli obat di warung dikarenakan tidak memiliki kartu kesehatan dari pemerintah.</p>
<p>Yosia kasih rania sinaga</p>	<p>2021</p>	<p>Implementasi program keluarga harapan di Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Jenis penelitian: metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>

		<p>Hasil penelitian menemukan hasil bahwa proses implementasi program keluarga harapan di desa sampali kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik.</p>	<p>Dari segi Disposisi ; masing-masing pihak telah menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan pihak pelaksana juga menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi sosial ekonomi para peserta PKH di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan secara umum telah dapat mematuhi dan melaksanakan kewajibannya masing-masing, baik komponen kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi peserta yang memiliki Balita dibawa ke Posyandu, dan anak usia Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA telah hadir ke sekolah dengan jumlah kehadiran yang tidak melanggar PKH.</p>
<p>Agnes Pradina</p>	<p>2019</p>	<p>Implementasi Kebijakan PKH Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kluwut Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes</p>	<p>Jenis penelitian: metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>

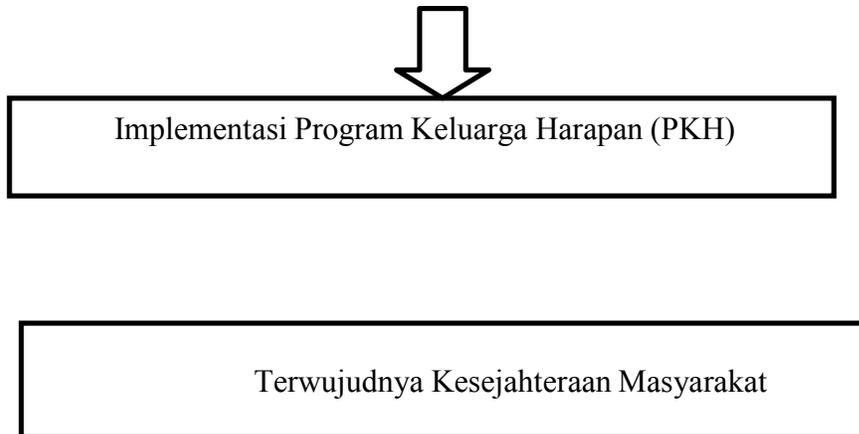
		<p>Hasil penelitian: menemukan penelitian berjalan dengan baik, berpotensi meningkatkan taraf hidup peserta PKH melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan.</p>	<p>Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Lihat Dari Aspek Komunikasi di Desa Kluwir dikategorikan kurang terimplementasi. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Lihat Dari Aspek Komunikasi di Desa Kluwut adalah Kepentingan, azas manfaat, budaya, dan aparat pelaksana.</p>
--	--	---	---

Sumber : Arsip Peneliti

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan tentang konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai kualitas yang identifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti meratai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Peraturan presiden RI NO 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan objek kerangka berpikir yang mau diteliti berikut penjelasannya. Perpres RI No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, di jelaskan bahwa kebijakan dan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi, dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Program Keluarga Harapan merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan yang di rencanakan yang akan mencapai hasil dan tujuan sesuai dengan yang di harapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membuat sebuah program yang akan di terapkan di wilayah-wilayan yang masih terdapat penduduk kurang mampu untuk mengurangi penduduk miskin di setiap wilayah khususnya di negara Indonesia, dimana program tersebut di namai Program Keluarga Harapan (PKH). Terwujudnya kesejahteraan masyarakat ialah dengan perlunya eksifensi kelembagaan daerah yang di isi oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional, yang dimana untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,

meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya dan lingkungan hidup.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif berdasarkan jenis data adalah bahwa data kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka statistik. Jadi data kualitatif adalah data yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema, yang belum diangkakan. Penelitian yang menggunakan data yang bukan dalam skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih, yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dan waktu penelitian berlangsung selama bulan April sampai bulan September 2023.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau cara yang sistematis dalam pengumpulan data dan fakta untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dan jenis data yang di gunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh objek yang akan diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data primer yaitu menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dengan kata lain adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.

B. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh tidak berasal dari sumber utama. Adapun cara peneliti untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui:

Dokumen.

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan sah.

3.3.1. Informan Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang di bahas,maka dalam penelitian ini penulis menggunakan informan.informan adalah seseorang yang benar benar mengetahui suatu persoalan.atau permasalahan tertentu yang darinya dapat di peroleh informasi yang jelas ,akurat ,dan terpercaya baik berupa pertanyaan pertanyaan, keterangan atau data data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.Dalam penelitian ini ,yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti di tempat penelitian di antaranya:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informasi utama. Berdasarkan pengertian informan kunci di atas, peneliti memutuskan bahwa informan kunci dalam penelitian ini adalah Setriawan sebagai Kepala Desa Sidomulyo.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dari pengertian informan utama di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan utama dalam penelitian ini adalah Imah Rosida dengan jabatan staf Seksi Kesejahteraan sebagai pendamping PKH.

3. Informan Tambahan

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian informan pendukung di atas, peneliti memutuskan bahwa informan pendukung dalam penelitian ini adalah Zulpri Sembiring Masyarakat Desa Sidomulyo

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, dan satuan urutan dasar sehingga dapat dikemukakan tema serta sesuai dengan apa yang disarankan dan tahapan analisis di atas sebagai berikut: Secara umum, pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Kemudian analisis

data juga merupakan proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Analisis

Pengumpulan Data pada analisis pertama maka dilakukan pengumpulan data dengan hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah-masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui penacarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting. Caranya ialah peneliti menulis ulang catatan-catatan di lapangan yang dibuat (ketika wawancara). Apabila wawancara direkam, maka dilakukan transkrip hasil rekaman terlebih dahulu, selanjutnya melakukan pemilihan informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda, kemudian penggalan bahan tertulis yang penting yang sesuai dengan yang dicari, dan penulis Reduksi Data Pengumpulan Data Penyajian Data Penarikan Kesimpulan menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh informan atau dokumen dalam penggalan tersebut

3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau bentuk yang mudah dipahami adalah cara yang paling penting dan utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap akhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan data yang peneliti dapat dari lapangan.